

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshidiqqie Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, sinar grafika, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, Safa'at Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah KonstitusiRI, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rienika Cipta, Jakarta.

Atok, A.Rosyid Al , 2015 *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negar Bikameral*, setara press, Malang.

Farida Indrati S Maria, 2007, *Ilmu Perundang- Undangan : Jenis, Fungsi,dan Materi Muatan*,penerbit Kanisius, Yogyakarta.

_____,2014, *Studi parlemen dan lanskap politik Indonesia*, setara press, Malang.

Huda Ni'matul,2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hübner Manders Conrado, 2013, *Constitutional Courts and Deliberative Democracy*, Oxford: Oxford University Press.

Kelsen Hans, 1949, *General Theory of Law*, Oxford University Press, London.

Mahfud MD Moh, 2003, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Manan Bagir, 2004, *MPR, DPR dan DPD dan UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

MPR RI, 2008, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 1999*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.

Nurdin Nurliah, 2012 *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat; Rivalitas Kekuasaan Antara Presiden dan Legislatif*, MIPI, Jakarta.

Pieris John dan Baramuli Putri Aryali, 2010, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rasyid Thalib, Abdul, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Robert Endi Jaweng, 2005, *Mengenal DPD-RI Sebuah Gambaran Awal, Institute For Local Development (ILD)*, Jakarta.

Siahaan Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Siahaan Maruarar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,

Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,

Jakarta.

Soematri Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*,

Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta

S. Suriasumantri jujun , 1986, *Ilmu dalam Prespektif Moral*, Alumni, Bandung.

Subardjo,2012, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut UUD Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945 Dan Penerapan system Bikameral dalam Lembaga

Perwakilan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sutiyoso Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca*

Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta.

Yusuf, M,2013, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Perandan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Zoelva Hamdan, 2016, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Masnur Marzuki, 2008, *Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya*, Jurnal Hukum, No 1 Vol 15 Januari 2018.

Mirja Fauzul Hamdi, 2018, *Rekonstruksi kedudukan Dewan Perwakilan Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014*, Kanun Jurnal ilmu Hukum, No 1 Vol 20, April 2018

Pirmasnyah, Miki, 2014, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Ryan Mutjiara Wasti, 2017, *Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah*, Jurnal hukum&Pembangunan 47,No 4 , Nopember 2017.

Rian Van Frits Kapitan, *Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum No.4 Vol.44 October 2015.

Rosidi Ahmad, 2015, *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol III Nomor 8 Agustus 2015.

Siahaan Maruarar, 2009, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.16, (No.3).

Syahrizal Ahmad, 2007, *Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*,” Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1 Maret

C. Tugas Akhir

Mochamad Amaludhin Alwi, 2018, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Bikameral Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

D. Internet

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> , diakses pada 20 Januari 2019, pada pukul 15.00 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111- 112-113/PUU-VII/2009

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Putusan Bawaslu Nomor 036/PS.REG/ BAWASLU/IX/2018.

Putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00/XII/2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2008 tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan,
Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Pemilih Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
DPD Tahun 2019.

Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Pemilih Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPD Tahun 2019.

E. Dokumen

Akta Surat Keputusan DPP Hati Nurani Rakyat (Hanura) Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Hanura Masa Bakti 2015-2020

Data Hasil Riset Indonesia Parliamentary Center, *Jumlah Afiliasi Anggota DPD*

Dalam Partai Politik, Tahun 2014-2019 (tidak dipublish)